

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN
KOMITE LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON
PADA PERUSAHAAN *CARBON INTENSIVE INDUSTRY* YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1)
Pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun Oleh:

Thalia Wijaya

NPM: 16 04 22842

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

Skripsi

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN
KOMITE LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON
PADA PERUSAHAAN *CARBON INTENSIVE INDUSTRY* YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019**

Disusun Oleh:

Thalia Wijaya

NPM: 16 04 22842

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

MG. Fitria Harjanti, SE., M.Sc.

Tanggal, 16 Agustus 2020



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

SURAT KETERANGAN

No. 679/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Jumat, 4 September 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dr. I Putu Sugiarta S, SE., M.Si., Akt., CA. | Ketua Penguji |
| 2. MG. Fitria Harjanti, SE., M.Sc. | Anggota |
| 3. Ignatia Ryana Widyatini, SE., M.Acc. | Anggota |

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Thalia Wijaya
NPM : 160422842

Dinyatakan
Lulus Tanpa Revisi

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON PADA PERUSAHAAN *CARBON INTENSIVE INDUSTRY* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Agustus 2020

Yang menyatakan

Thalia Wijaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan karya tugas akhir ini.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan *Carbon-Intensive Industry* yang terdaftar di BEI periode 2016-2019”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan-hambatan dimana tanpa bantuan dari orang-orang sekitar penulis, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih dan kekuatan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga tercinta Papa, Mama, Ce Siska, Elent, Velent, Cyntia, dan Cindy atas dukungan, doa, dan semangat yang terus diberikan kepada penulis.

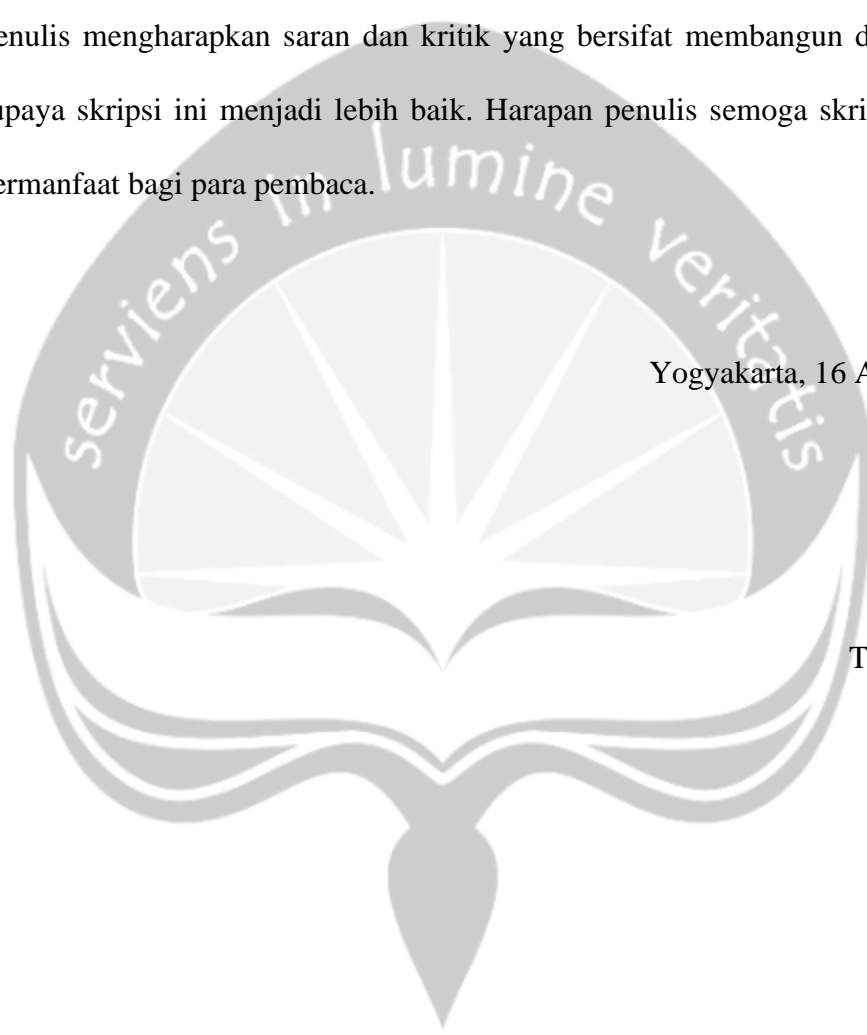
3. Ibu MG. Fitria Harjanti, SE, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang selama ini dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, dukungan dan doa kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staff dan karyawan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang memberikan pengajaran dan membantu peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Deviana, Stevanie, dan Ruthe sahabat-sahabat penulis yang telah setia mengingatkan, memotivasi, memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
6. Stell, Desy, Ursula, Vera, Edo dan Bayu sahabat yang telah banyak membantu dan berjuang bersama Penulis melewati perkuliahan dalam keadaan suka dan duka.
7. Ko edo, William, Buddhi, Rickxen, dan Viky sahabat yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
8. Felicia, Tessya, Anita, Vinny, Marlina, Eligia dan Angelia sahabat yang selalu mendukung penulis dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Ricky, Kelvin, Julie dan Vinny sahabat yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Ko Elvi, Lukito, Veren, Fitry, William J, Sheila dan teman-teman KDJU lainnya yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
11. Teman-Teman KKN Dlingseng yang telah memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca supaya skripsi ini menjadi lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 16 Agustus 2020

Thalia Wijaya



MOTTO

FOKUS!!!

NEVER GIVE UP

**KEEP MOVING
FORWARD**

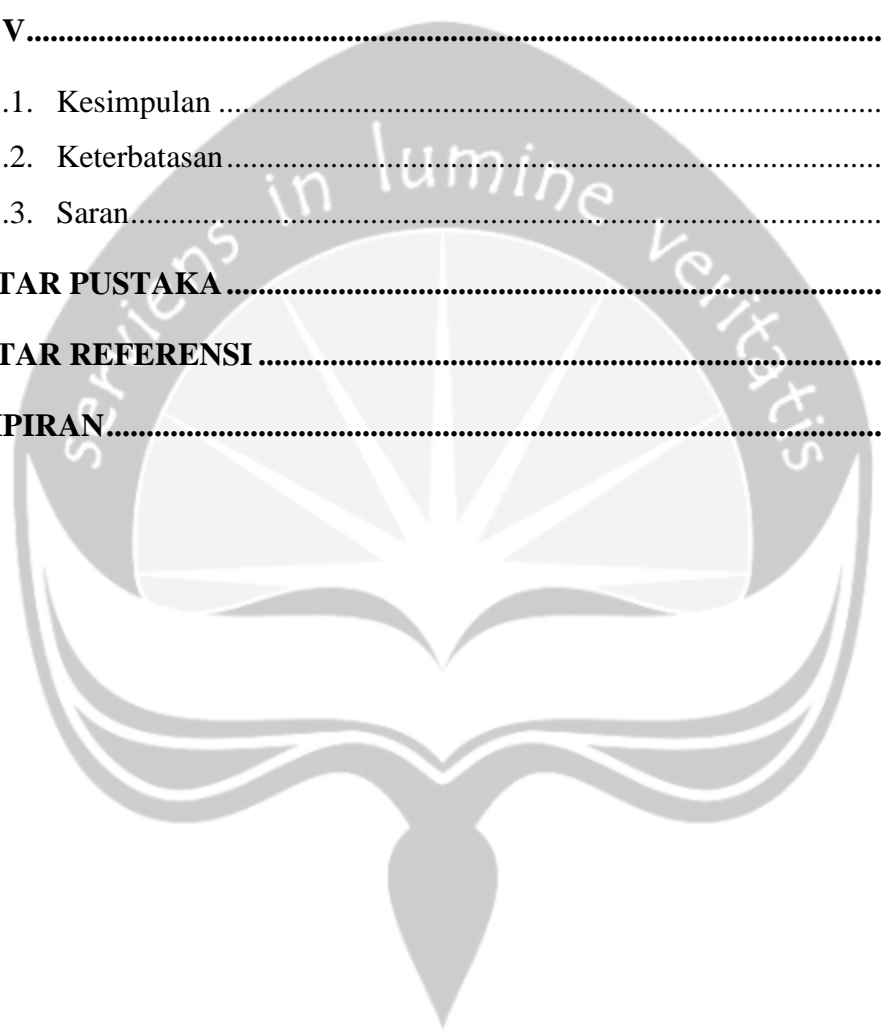
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Manfaat Penelitian	7
1.5.Sistematika Penulisan	7
BAB II	9
2.1. Teori Legitimasi	9
2.2. Teori Stakeholder	10
2.3. Pengungkapan Emisi Karbon.....	12
2.3.1. Pengungkapan Sukarela.....	12
2.3.2. Pengertian Emisi Karbon.....	13
2.3.3. Pengungkapan Emisi Karbon	13

2.4. <i>Good Corporate Governance</i>	16
2.4.1. Prinsip <i>Corporate Governance</i>	16
2.4.2. Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	17
2.5. Dewan Direksi.....	18
2.6. Dewan Komisaris Independen	19
2.7. Komite Lingkungan	20
2.8. Hasil Penelitian Terdahulu	20
2.9. Pengembangan Hipotesis	26
2.9.1. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	26
2.9.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.....	28
2.9.3. Pengaruh Komite Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	29
BAB III.....	30
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2. Populasi dan Objek Penelitian	30
3.3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	31
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	32
3.4.1. Variabel Independen	32
3.4.1.1.Dewan Direksi.....	32
3.4.1.2.Dewan Komisaris Independen	32
3.4.1.3.Komite Lingkungan	33
3.4.2. Variabel Dependen.....	33
3.4.3. Variabel Kontrol.....	34
3.4.3.1.Ukuran Perusahaan.....	34
3.5. Model Penelitian	35
3.6. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	36

3.6.1.	Jenis Data	36
3.6.2.	Teknik Pengumpulan Data	36
3.7.	Analisa Data	36
3.7.1.	Uji Pendahuluan	36
3.7.1.1.	Uji Normalitas	36
3.7.1.2.	Uji Asumsi Klasik	37
3.7.1.3.	Statistik Deskriptif	39
3.7.2.	Uji Hipotesis	39
3.7.2.1.	Hipotesis Statistik	39
3.7.2.2.	Tingkat Kesalahan	40
3.7.2.3.	Model Penelitian	41
3.8.	Kriteria Pengujian	42
BAB IV	45
4.1.	Hasil Pemilihan Sampel	45
4.2.	Statistik Deskriptif	46
4.3.	Uji Asumsi Klasik	47
4.3.1.	Uji Normalitas	47
4.3.2.	Uji Multikolinearitas	48
4.3.3.	Uji Heterokedastisitas	50
4.3.4.	Uji Autokorelasi	51
4.4.	Uji hipotesis	53
4.4.1.	Uji F	53
4.4.2.	Uji t	53
4.4.3.	Koefisien Determinasi (R^2)	55
4.5.	Pembahasan hasil penelitian	56
4.5.1.	Hubungan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	56

4.5.2. Hubungan Dewan Komisaris Independen terhadap pengungkapan emisi karbon.....	58
4.5.3. Pengaruh Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon	58
BAB V.....	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Keterbatasan.....	60
5.3. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR REFERENSI	65
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. <i>Carbon Disclosure Index</i>	14
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 4.1. Kriteria Sampel	45
Tabel 4.2. Statistik Deskriptif	46
Tabel 4.3. Uji Normalitas.....	48
Tabel 4.4. Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4.5. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji <i>Glejser</i>	50
Tabel 4.6. Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.7. Uji Autokorelasi dengan <i>Cochrane Orcutt</i>	52
Tabel 4.8. Uji F	53
Tabel 4.9. Uji T	54
Tabel 4.10. Koefisien Determinasi (R^2).....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Model Penelitian 35



PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGKAPAN EMISI KARBON PADA PERUSAHAAN *CARBON INTENSIVE INDUSTRY* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019

Disusun Oleh:

Thalia Wijaya

16 04 22842

Pembimbing:

MG. Fitria Harjanti, SE., M.Sc.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan *carbon-intensive industry* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite lingkungan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan *Carbon Disclosure Index* (CDI) dan variabel kontrol untuk melengkapi regresi dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari total aset. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *carbon intensive industry* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019 yang berjumlah 20 perusahaan pertahun. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 80 perusahaan. Metode yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian adalah metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemanasan global merupakan salah satu masalah yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi seiring dengan perkembangan industri. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapi dengan situasi darurat iklim yang dapat dilihat dari tingginya suhu permukaan bumi, pemanasan global, dan terjadinya anomali cuaca. (IPCC, 2016)

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia pada aktivitas perusahaan. Faktanya, Indonesia turut menyumbang peningkatan emisi karbon yang tinggi. Pada tahun 2015, Data *World Resources Institute* (WRI) menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat keenam sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Menurut data *Brown to Green Report 2018*, terjadi peningkatan emisi karbon sebesar 18% sepanjang 2012-2017 di Indonesia. Peningkatan emisi karbon ini disebabkan karena meningkatnya emisi dari pembangkit listrik, sektor industri dan transportasi.

Selain berdampak pada perubahan iklim yang ekstrem, emisi karbon juga dapat meningkatkan resiko konflik, banjir, kekeringan, kerusakan ekosistem, kelaparan, Kesehatan dan ekonomi. Jika terus dibiarkan maka peningkatan emisi

karbon dapat mengancam masa depan dunia. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan dari masyarakat dunia kepada organisasi dunia dan pemerintah agar mengambil strategi proaktif untuk mengatasi permasalahan emisi karbon. Beberapa negara telah melakukan kesepakatan mengenai perubahan iklim, termasuk Negara Indonesia.

Pada tahun 1997, *The United Nations* (PBB) mengesahkan Protokol Kyoto. Tujuan utama dari Protokol Kyoto adalah untuk mengurangi dampak pemanasan global ke tingkat yang dapat diterima dengan menstabilkan emisi gas rumah kaca (GRK). Pada tahun 2004, Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Protokol Kyoto dengan mengesahkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim dan ikut serta dalam upaya menurunkan emisi GRK global.

Komitmen Indonesia sebagai negara berkembang, turut berupaya dalam menurunkan emisi karbon dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Emisi Rumah Kaca. Pada tahun 2016, Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim.

Dengan adanya komitmen pemerintah dalam upaya penurunan emisi karbon dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Upaya pertanggungjawaban perusahaan terkait emisi karbon perlu diungkapkan pada laporan tahunan dan/atau laporan berkelanjutan

perusahaan. Namun di Indonesia pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) sehingga belum banyak perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon di laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaannya. Standar laporan tahunan / laporan berkelanjutan yang dimiliki Indonesia belum secara langsung mengatur mengenai pengungkapan emisi karbon. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indeks pengukuran emisi karbon yaitu *Carbon Disclosure Index* (CDI) yang dikembangkan oleh Choi et al. (2013).

Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon dapat menciptakan citra perusahaan yang baik dimata investor. Menurut Manurung (2017), *Good Corporate Governance* berperan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengungkapan emisi karbon. Hal ini berkaitan dengan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dan kesetaraan. Dalam prinsip transparansi perusahaan diharuskan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas harus mempunyai laporan dampak perusahaan terhadap masyarakat. Informasi yang ada merupakan salah satu wujud peduli perusahaan terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini struktur *corporate governance* yang digunakan adalah dewan direksi dan dewan komisaris independen.

Dewan direksi merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. Tugas dan fungsi utama dewan direksi adalah menjalankan roda manajemen perseroan secara menyeluruh. Tugas utama

lainnya adalah mengupayakan perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab sosialnya sertam memperhatikan kepentingan pemegang saham (Darini, 2005).

Dewan komisaris merupakan organ dari emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dilakukan atas kebijakan kepengurusan baik perseroan maupun usaha perseroan. (POJK, 2014)

Manurung (2017) mengatakan bahwa perusahaan menunjuk komite khusus untuk menangani masalah lingkungan dari perspektif resiko, peluang strategis dan komitmen kepada pemangku kepentingan. Komite khusus ditunjuk untuk memberikan pengawasan secara aktif dalam memantau legitimasi dan reputasi perusahaan (Gregg, 2009). Komite khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite lingkungan.

Tujuan komite lingkungan adalah untuk secara sistematis merencanakan, melaksanakan dan meninjau kebijakan dan kegiatan keberlanjutan. Komite lingkungan dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang aspek lingkungan dari pekerjaan dan tanggung jawab mereka untuk mengurangi dampak negatif. Komite lingkungan memiliki wewenang untuk menetapkan target ambisius dan penghargaan finansial dan non-finansial yang diperlukan untuk membimbing staf ke dalam tindakan dan mengilhami perubahan yang meningkatkan kemampuan beradaptasi dari organisasi. (Yunus, 2016).

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Manurung et al. (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi dan komite lingkungan berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Liao et al. (2014) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian yang dilakukan oleh Budiharta dan Kacaribu menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Dalam penelitian ini peneliti memilih *carbon-intensive industry* sebagai objek penelitian. Peneliti menggunakan *carbon-intensive industry* karena perusahaan yang tergolong sebagai *carbon-intensive industry* merupakan perusahaan yang paling banyak berkontribusi terhadap perubahan iklim (Pratiwi dan Sari, 2016). Terdapat 8 sub sektor industri yang termasuk dalam *carbon-intensive industry* yaitu industri semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, keramik dan kaca, pupuk, petrokimia serta makanan dan minuman. Penelitian mengenai pengungkapan emisi karbon pada perusahaan *carbon intensive industry* belum banyak dilakukan di Indonesia. Hasil penelitian yang tidak konsisten juga membuat topik ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen dan Komite Lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan *carbon intensive industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim berdampak pada peningkatan emisi karbon. Peningkatan emisi karbon yang cukup besar membuat perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan *stakeholders*. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan dapat diungkapkan melalui pengungkapan emisi karbon pada laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan adalah dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah komite lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan *carbon intensive industry* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite lingkungan bagi terhadap pengungkapan emisi karbon.

b. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan dalam melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan investor dan calon investor dalam pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, amanfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan teori yang melandasi penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pemilihan sampel, statistic deskriptif, hasil analisis data dan penjelasan dari setiap hasil statistik yang diperoleh.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang diajukan penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Teori legitimasi didasarkan pada kontrak sosial (Ghozali dan Chariri, 2007). Kontrak sosial dapat terjadi diantara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan mengkonsumsi sumber daya. Masyarakat memiliki harapan tentang bagaimana perusahaan harus bertindak agar masyarakat dapat bertahan dimasa depan. Perusahaan atau bisnis sesungguhnya menerima perjanjian untuk beroperasi dari sosial dan mereka harus secara akuntabel menginformasikan bagaimana perusahaan beroperasi (Rankin, 2012).

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk beroperasi sesuai dengan norma yang dimiliki masyarakat. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan hak-hak masyarakat luas, bukan hanya kepada pemegang sahamnya saja. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk melakukan legitimasi dengan cara melakukan pengungkapan dalam laporan perusahaan.

2.2. Teori Stakeholder

Menurut Chariri dan Ghozali (2007), teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus dapat memberikan manfaat untuk *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Menurut Rankin (2012), teori *stakeholder* merupakan turunan teori politik ekonomi yang memiliki hubungan erat dengan teori legitimasi. Perbedaan utama antara teori legitimasi dan teori *stakeholder* adalah teori *stakeholder* mempertimbangkan hubungan yang ada antara organisasi dan berbagai macam pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sedangkan teori legitimasi berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Menurut Rankin (2012), teori *stakeholder* dibagi menjadi dua:

1. *Normative Branch of Stakeholder Theory*

Teori ini berkaitan dengan pelakuan etis atau moral dari *stakeholders* perusahaan. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil, dan perusahaan harus dikelola untuk kepentingan semua pemangku keuntungannya. *Normative Branch of Stakeholder Theory* berargumentasi bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi mereka mempengaruhi pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan laba untuk kepentingan pemilik perusahaan saja.

2. *Managerial Branch of Stakeholder Theory*

Managerial Branch of Stakeholder Theory adalah teori positif yang berupaya menjelaskan bagaimana pemangku kepentingan dapat memengaruhi tindakan perusahaan. Teori ini berfokus pada hubungan dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam masyarakat dan bukan masyarakat secara keseluruhan. Teori ini mempertimbangkan para pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan atau pengaruhnya pada perusahaan. Perusahaan akan lebih mempertimbangkan pemangku kepentingan yang menguasai atau memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Manajer memiliki peran penting dalam mempertimbangkan kepentingan relatif dari masing-masing pemangku kepentingan untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan. Tingkat kekuatan atau pengaruh pemangku kepentingan masing-masing cenderung berubah seiring waktu dan dalam keadaan yang berbeda.

Informasi tentang kegiatan dan kinerja organisasi yang diungkapkan dapat menunjukkan bagaimana arah, misi, atau tujuan strategis selaras dengan harapan para pemangku kepentingan, atau bagaimana kinerja keuangan atau lingkungan organisasi memenuhi persyaratan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat menjadi salah satu cara yang untuk mendapatkan dukungan atau persetujuan dari para pemangku kepentingan, atau untuk mengalihkan perhatian mereka dari kegiatan yang kurang diinginkan (Rankin, 2012).

2.3. Pengungkapan Emisi Karbon

2.3.1. Pengungkapan Sukarela

Saat ini, perusahaan sudah mulai dituntut untuk lebih terbuka terhadap informasi mengenai perusahaan tersebut. Menurut Hendriksen (1982), pengungkapan merupakan informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan tahunan dan berisi penjelasan, catatan, atas pernyataan, dan taambahan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan catatan. Ada 2 jenis pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan sebuah perusahaan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Setiap negara memiliki peraturan mengenai informasi apa saja yang wajib diungkapkan oleh emitennya. Informasi yang wajib diungkapkan oleh emiten disebut dengan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Informasi yang disampaikan dan dilakukan secara sukarela oleh perusahaan di luar pengungkapan wajib disebut dengan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Tidak ada peraturan mengenai pengungkapan sukarela, sehingga terdapat keragaman tentang pengungkapan sukarela pada setiap perusahaan. Pengungkapan sering dilakukan perusahaan karena adanya ketidakpuasan terhadap pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sehingga timbul tuntutan dari *stakeholders* untuk meningkatkan pelaporan perusahaan (Rankin, 2012)

2.3.2. Pengertian Emisi Karbon

Emisi Karbon merupakan suatu ukuran atas total emisi gas rumah kaca yang disebabkan secara langsung dan tidak langsung oleh suatu organisasi, produk peristiwa atau seseorang. Sebagian besar gas rumah kaca umumnya dihasilkan oleh aktivitas manusia, yaitu karbon dioksida, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik, pemanasan, transportasi (Heizer, 2014).

Kementerian Lingkungan Hidup mendefinisikan emisi gas rumah kaca sebagai proses lepasnya gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu. Gas Rumah Kaca merupakan gas-gas yang berada di atmosfer yang menimbulkan dampak pada suhu atmosfer bumi akibat dari panas radiasi. Hal ini menyebabkan adanya efek pemanasan yang disebut efek rumah kaca. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis gas utama yang disepakati perjanjian internasional untuk dikurangi. Gas-gas tersebut adalah karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrus oksida (N_2O).

2.3.3. Pengungkapan Emisi Karbon

Sebagai salah satu jenis pengungkapan yang tercantum di dalam laporan tahunan perusahaan, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela di Indonesia. Belum ada peraturan yang menyatakan bahwa informasi mengenai emisi karbon wajib diungkapkan oleh perusahaan publik dalam laporan tahunannya. Oleh sebab itu, perusahaan berhak menentukan ingin mengungkapkan atau tidak informasi mengenai emisi karbon tersebut.

Pengungkapan Emisi karbon dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan yang dikembangkan oleh Choi, et al (2013). Dalam penelitiannya, Choi, et al. (2013) mengembangkan *check list* berdasarkan lembar permintaan informasi yang diberikan oleh CDP (*Carbon Disclosure Project*). CDP merupakan organisasi nirlaba yang menyediakan informasi luas mengenai perubahan iklim di dunia dan memiliki 3000 organisasi di 60 negara (choi, et al. 2013). Indeks pengungkapan emisi karbon yang diadopsi dari choi et al. (2013) terdiri dari lima kategori terkait perubahan iklim dan emisi karbon dengan 18 item identifikasi. Berikut merupakan indeks pengungkapan emisi karbon yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1
Carbon Disclosure Index

Kategori	Item
Perubahan Iklim: Resiko dan Peluang (CC/ <i>Climate Change</i>)	CC-1: Penilaian/deskripsi terhadap resiko(peraturan/regulasi baik khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan Tindakan yang diambil untuk mengelola resiko tersebut.
	CC-2: Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim.
Emisi Gas Rumah Kaca (GHG/ <i>Greenhose Gas</i>)	GHG-1: Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (misalnya protocol GRK atau ISO)
	GHG-2: Keberadaan verifikasi eksternal kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa
	GHG-3: Total emisi gas rumah kaca

	(metric ton CO ² -e) yang dihasilkan.
	GHG-4: Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau emisi GRK langsung.
	GHG-5: Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misalnya: batu bara, listrik, dll)
	GHG-6: Pengungkapan emisi GRK berdasarkan fasilitas atau level segmen.
	GHG-7: Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya.
Konsumsi Energi (EC/ <i>Energy Consumption</i>)	EC-1: Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya: tera-joule atau PETA-joule).
	EC-2: Kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui
	EC-3: Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen.
Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya (RC/ <i>Reduction and Cost</i>)	RC-1: Detail/rincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK
	RC-2: Spesifikasi dari target tingkat/level dan tahun pengurangan emisi GRK
	RC-3: Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (<i>costs r savings</i>) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi karbon.
	RC-4: Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (<i>capital expenditure planning</i>)
Akuntabilitas Emisi Karbon (AEC/ <i>Accountability of Emission Carbon</i>)	AEC-1: Indikasi dimana dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung jawab atas Tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
	AEC-2: Deskripsi mekanisme dimana dewan (atau badan eksekutif lainnya) meninjau kemajuan perusahaan mengenai perubahan iklim.

Sumber : Choi et al, 2013 dalam jurnal Jannah dan Muid, 2014

2.4. Good Corporate Governance

Menurut Rankin, et. al. (2012) *Corporate Governance* adalah sistem dimana bisnis perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dan dirancang untuk mengarahkan pengelola perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

2.4.1. Prinsip Corporate Governance

Menurut Effendi (2016) prinsip-prinsip *corporate governance* dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), Independensi (*Independency*), dan kesetaraan (*fairless*) ada 5 prinsip dasar penerapan *Good Corporate Governance*:

1. Transparansi (*transparency*) yaitu perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan.

2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkannya.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu perusahaan perlu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Independensi (*Independency*) yaitu perusahaan harus menjalankan tugasnya dengan baik dan mengambil keputusan dengan baik secara mandiri.
5. Kesetaraan (*fairless*) yaitu perusahaan harus mampu memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham

2.4.2. Mekanisme Corporate Governance

Menurut Sutedi (2011) terdapat unsur-unsur corporate governance yang berasal dari luar perusahaan (dan yang selalu diperlukan di luar perusahaan) serta unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan di dalam perusahaan). Unsur-unsur dari dalam dan dari luar perusahaan dapat menjamin berfungsinya tata Kelola yang baik. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. *Corporate Governance* – Eksternal Perusahaan (Mekanisme Eksternal) merupakan unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan. Mekanisme eksternal *corporate governance* yaitu kecukupan undang-undang dan perangkat hukum; investor; institusi penyedia informasi; akuntan publik; institusi yang

memihak kepentingan publik bukan golongan; pemberi pinjaman; Lembaga yang mengesahkan legalitas.

2. *Corporate Governance* – Internal Perusahaan (Mekanisme Internal)

Merupakan unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan dalam perusahaan. Mekanisme internal *corporate governance* yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasarkan kinerja.

Dalam penelitian ini, digunakan mekanisme internal *corporate governance* yang terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris independen.

2.5. Dewan Direksi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 33 tahun 2014 tentang Direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan direksi adalah organ emiten atau perusahaan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan perusahaan publik untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dapat disimpulkan bahwa dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan direksi juga bertanggungjawab atas perolehan legitimasi perusahaan dari publik dan pemangku kepentingan.

Fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan direksi adalah memimpin pelaksanaan perusahaan setiap hari melalui kebijakan strategik yang telah disepakati

bersama untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan oleh RPS dengan menimbulkan risiko seras tetap menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* (Daniri, 2005).

2.6. Dewan Komisaris Independen

Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Dewan Komisaris adalah Orang Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada direksi. Dewan komisaris juga berperan sebagai pengawas agar semua kepentingan *stakeholder* dapat terpenuhi berdasarkan asas kesetaraan. Selain itu, dewan komisaris harus memastikan bahwa *Corporate governance* dalam perusahaan sudah diterapkan. Tentunya, ukuran dewan komisaris ditentukan dengan kompleksnya ukuran perusahaan itu sendiri.

Terdapat dua jenis dewan komisaris, yaitu dewan komisaris independen dan dewan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (effendi,2016). Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya, serta tidak mempunyai hubungan usaha berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Selain itu, komisaris independen tidak memiliki saham pada perusahaan terkait. Tugas dari komisaris independen adalah memastikan praktik dan prinsip-prinsip *good corporate governance* telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

2.7. Komite Lingkungan

Michelon dan Parbonetti (2012) mengatakan bahwa perusahaan sering kali menunjuk komite khusus untuk mengatasi masalah lingkungan dan perspektif resiko, peluang strategis dan komitmen kepada para pemangku kepentingan. Ditunjuknya komite khusus untuk mengatasi masalah lingkungan bertujuan untuk melakukan perencanaan, implementasi dan tujuan terkait kebijakan dan kegiatan keberlanjutan secara sistematis. Komite lingkungan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan resiko lingkungan. Hal ini mencakup resiko reputasi dan ancaman lingkungan terhadap legitimasi.

Adanya komite lingkungan pada perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang aspek lingkungan dari kegiatan operasi perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Peran komite lingkungan sehubungan dengan pengungkapan lingkungan adalah memastikan pengungkapan akuntansi lingkungan yang tepat. Komite lingkungan memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan mencatat, dan mempehitungkan emisi GRK secara kredibel dan karenanya cenderung melihat pentingnya pelaporan GRK (Micheln dan Pabonetti, 2012).

2.8. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Manurung et.al. (2017) mengenai pengaruh dewan komisaris independen, dewan direksi, keagamaan gender, dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek yaitu perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite lingkungan memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen dan keragaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan Liao et al. (2014) meneliti pengaruh keragaman gender, dewan independen, dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon dengan ukuran direksi sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender, komite lingkungan, dan dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan Budiharta dan Kacaribu (2020) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, dewan direksi dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan oleh Akhiroh dan Kiswanto (2016) meneliti pengaruh kinerja lingkungan, visibilitas organisasi, kondisi keuangan dan mekanisme tata Kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Objek penelitian ini

adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visibilitas organisasi, profitabilitas, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara kinerja lingkungan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sementara kinerja lingkungan, kesulitan keuangan, kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan oleh Kilic dan Kuzey (2019) menguji pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan direksi independen, direksi asing, keragaman gender, dan komite lingkungan terhadap pengaruh pengungkapan emisi karbon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek perusahaan non keuangan Turki yang terdaftar di Bursa Istanbul selama periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa direksi asing dan komite lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Ukuran dewan direksi, proporsi direksi independen dan keragaman gender tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Tabel 2.2.

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Objek	Hasil
1.	Manurung et.al. (2017)	“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Keragaman	Variabel Independen: Komisaris Independen,	Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di BEI	H ₁ : Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon

		Gender dan Komite Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di BEI”	Dewan Direksi, Keragaman Gender dan Komite Lingkungan		H ₂ : Dewan Komisaris Independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon H ₃ : Komite lingkungan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon H ₄ : Keragaman Gender tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
2.	Liao et.al (2014)	“Pengaruh Keragaman Gender, dewan independen dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di BEI	Variabel Independen: Keragaman Gender, dewan independen dan komite lingkungan <i>Variabel</i> Dependen: Pengungkapan emisi karbon Variabel Kontrol: Dewan Direksi	Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di BEI	H ₁ : Keragaman Gender berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon H ₂ : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon H ₃ : Komite Lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
3.	Budiharta dan	“Pengaruh Kepemilikan	Variabel Independen:	Perusahaan Non-keuangan	H ₁ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh

	Kacaribu (2020)	Manajerial, Dewan direksi dan Komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI”	Kepemilikan Manajerial, dewan direksi dan Komite Audit Variabel Dependen: Pengungkapan Emisi Karbon	yang terdaftar di BEI	positif terhadap pengungkapan emisi karbon H ₂ : Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon H ₃ : Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
4.	Akhiroh dan Kiswanto (2016)	“Pengaruh Kinerja lingkungan, visibilitas organisasi, kondisi keuangan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon yang terdaftar di BEI”	Variabel Independen: Kinerja lingkungan, visibilitas organisasi, profitabilitas, kesulitan keuangan kepemilikan manajerial, kmite audit, kepemilikan institusional dan proporsi komisariss independen Variabel Dependen:	Perusahaan Non-keuangan yang terdaftar di BEI	H ₁ : Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon H ₂ : Visibilitas organisasi berepengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon H ₃ : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon H ₄ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon H ₅ : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

			Pengungkapan Emisi Karbon		<p>emisi karbon</p> <p>H₆: kesulitan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon</p> <p>H₇: Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon</p> <p>H₈: Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon</p>
5.	Kilic dan Kuzey (2019)	“Pengaruh ukuran dewan direksi, proporsi dewan direksi independen, direksi asing, keragaman gender dan komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan non keuangan Turki”	Variabel Independen: Direksi asing, komite lingkungan, ukuran dewan direksi, proporsi direksi independen dan keragaman gender	Perusahaan Non-Keuangan Turki yang terdaftar di Bursa Istanbul	<p>H₁: Direksi asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon</p> <p>H₂: Komite Lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon</p> <p>H₃: Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon</p> <p>H₄: Proporsi dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi</p>

					karbon H ₅ : Keragaman Gender tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
--	--	--	--	--	---

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori legitmasi menyatakan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Upaya pertanggungjawaban perusahaan terkait emisi karbon dapat diungkapkan perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon.

Dewan direksi sebagai salah satu organ dari *corporate governance*, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan strategi bisnis yang berkelanjutan sehingga perlu memastikan bahwa dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan yang memiliki risiko material dipantau dengan baik dan diungkapkan sepenuhnya (Ben-Amar et al., 2017). Fungsi, wewenang dan tanggung jawab dewan direksi adalah memimpin pelaksanaan perusahaan setiap hari melalui kebijakan strategik yang telah disepakati bersama untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan oleh RPS dengan menimbulkan risiko seras tetap menjaga hubungan baik dengan para *stakeholder* (Daniri, 2005).

Banyaknya dewan direksi dapat meningkatkan kapasitas pemantauan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya peningkatan pemantauan, perusahaan akan lebih memperhatikan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan melakukan strategi untuk mengatasi dampak lingkungan akibat emisi karbon. Dewan direksi akan berusaha melegitimasi kegiatan perusahaan terkait dengan memberikan informasi melalui pengungkapan emisi karbon sehingga dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar mungkin lebih kuat untuk menangani masalah emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon (Kilic dan Kuzey, 2019).

Hasil penelitian terdahulu Liao et al (2014) menemukan hubungan positif antara ukuran dewan direksi dengan pengungkapan emisi karbon. Hal ini, mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi pada perusahaan, maka semakin luas pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1: Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

2.9.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral untuk mempertimbangkan bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi pemangku kepentingan dan tidak boleh hanya berkonsentrasi pada memaksimalkan laba untuk

kepentingan pemilik perusahaan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk memenuhi tuntutan dari *stakeholders* adalah melaporkan informasi terkait emisi karbon pada laporan tahunan dan keberlanjutan.

Dalam melakukan fungsi pengawasan manajemen dan perlindungan terhadap *stakeholders*, dewan komisaris independen akan mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Tuntutan dan harapan dari *stakeholders* dapat disampaikan oleh dewan komisaris independen melalui rapat yang dilakukan dewan komisaris bersama dewan direksi. Proporsi dewan komisaris independen yang tinggi dapat memonitor manajemen menjadi lebih efektif. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen, maka semakin banyak pihak yang dapat mendorong perusahaan melakukan tanggung jawab lingkungan terkait emisi karbon dan melakukan pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

2.9.3. Pengaruh Komite Lingkungan Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.

Aktivitas operasi perusahaan merupakan salah satu penyumbang emisi karbon yang berdampak pada pemanasan global. Hal ini menyebabkan timbulnya tuntutan dari masyarakat terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas

operasinya. Teori Legitimasi menyatakan bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Adanya komite lingkungan merupakan motif legitimasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan dan praktik pengukuran terkait lingkungan.

Komite lingkungan merupakan komite yang ditunjuk secara khusus oleh perusahaan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang berkaitan isu lingkungan. Komite lingkungan sangat penting guna menjalankan pemantauan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan emisi karbon (Rankin et al. 2011). Adanya komite lingkungan pada suatu perusahaan pada suatu perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas.

Hasil penelitian terdahulu Kilic dan Kuzey (2019) menemukan hubungan positif anatar komite lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya komite lingkungan berdampak pada semakin luasnya pengungkapan emisi karbon yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha3: Komite Lingkungan Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
2. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
3. Komite lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon masih terbatas. Hal ini mengakibatkan sedikitnya jumlah perusahaan yang dapat diteliti.

5.3. Saran

Saran untuk peneliti selanjutnya adalah peneliti dapat menggunakan periode peristiwa yang berbeda baik diperpanjang maupun diperpendek, perubahan ini memungkinkan hasil yang sama ataupun berbeda dari penelitian ini. Selain itu

peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel independen lainnya yang diduga dapat berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon, seperti dewan komisaris, keberagaman gender, media exposure, dan komite audit.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhiroh, T., & Kiswanto.(2016). The Determinant Of Carbon Emission Disclosure. *Accounting Analysis Journal*, 326-336.
- Budiharta, P., & Kacaribu, H.E. (2020). The Influence of Board of Directors, Managerial Ownership, and Audit Committee on Carbon Emission Disclosure: A Study of Non-Financial Companies Listed on BEI. *Journal Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol 9.
- Choi, B., D. W. , L., & J. Psaros. (2013). An Analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosure. *Pacific Accounting Review (Vol. 25, No. 1)*.
- CNN. (2019). *Emisi Karbon Dioksida Global Capai Rekor Tertinggi Tahun 2019*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191205191747-57199-454565/emisi-karbon-dioksida-global-capai-rekor-tertinggi-tahun-2019-pada-24-Desember-2019>.
- Daniri, M. (2005). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Effendy, M.A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Majid, R.A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca pada Perusahaan di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 4 No 2.

- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Hendriksen, E. (1982). *Accounting Theory*. R.D. Irwin.
- Kacaribu, H. E. (2019). Pengaruh Dewan Direksi dan Kepemilikan Manajerial. *Skripsi. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Kehutanan, K. L. (2015). Kesepakatan COP21/ Paris. Diakses dari <http://ditjenppi.menlhk.go.id/program/liputan-khusus-cop-21-2015/kesepakatan-cop21-paris.html> pada 17 April 2019.
- Kilic, M., & Kuzey, C. (2019). The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosures: Evidence. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*. Vol. 11 Issue: 1, pp 35-53.
- Liao, L., Luo, L., & Tang, Q. (2014). Gender Diversity, Board Independence, Environmental Committee and Greenhouse Gas Disclosure. *Forthcoming: British Accounting Review*.
- Madura, J. (2007). *Pengantar Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Manurung, D., Kusumah, R., & Asikin, B. (2017). *Peran Corporate Governance dan Komite Lingkungan dalam Green House Gas Disclosure*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Michelon, G., & Parbonetti, A. (2012). The Effect of Corporate Governance on Sustainability Disclosure. *Journal of Management and Governance*, 16(3), pp. 477-509.
- Perpres No. 61 tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- Perpres No. 71 tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2014).

Pratiwi, P.C., & Sari, V.F. (2016). Pengaruh Tipe Industri, Media Exposure dan Profitabilitas terhadap Carbon Emission Disclosure. *Jurnal WRA*, Vol 4 No.2.

Rankin, M. (2012). *Contemporary Issues in Accounting*. Australia: John Wiley & Sons Australia. Ltd.

Scot, William R. (2012). *Financial Accounting Theory*. Sixth Edition Canada: Pearson Prentice Hall.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)

Yunus, S., Eljido-Ten, E., & Abhayawansa, S. (2016). Determinants Of Carbon Management Strategy Sdoption. *Managerial Auditing Journal*, 31(2), 156–179.

DAFTAR REFERENSI

www.idx.co.id

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190923121304-199-432939/laporan-perubahan-iklim-pbb-2019-jadi-tahun-terpanas>

<https://www.pmr-indonesia.org/sosialisasi-laporan-final-kajian-penyusunan-profil-dan-baseline-emisi-grk-sektor-industri/>

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/06/155949969/pemanasan-global-proses-penyebab-dan-dampaknya?page=all>

<https://climateaction100.wordpress.com/about-us/>



Lampiran 1: DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL PENELITIAN

Perusahaan Tergolong Carbon-Intensive Industry

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk.
3	ANJT	Austindo Nusantara Jaya Tbk.
4	BUDI	Budi starch & sweetener Tbk.
5	CTBN	Citra Turbindo Tbk.
6	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk.
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT
9	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk.
11	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk.
12	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
13	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk, PT
14	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
15	SMAR	Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.
16	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
17	SMCB	Solusi Bangun Indonesia Tbk.
18	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
19	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
20	WTON	Wijata Karya Beton Tbk.

Lampiran 2: PERHITUNGAN VARIABEL PENELITIAN

Kode Perusahaan	Tahun	Dewan Direksi	Dewan Komisaris	Komite Lingkungan	Ukuran Perusahaan	CED
AALI	2016	6	0,5000	1	30,8185	0,39
AMFG	2016	11	0,3333	0	29,3367	0,06
ANJT	2016	6	0,5556	1	29,6571	0,50
BUDI	2016	7	0,3333	0	28,7066	0,28
CTBN	2016	5	0,3333	0	28,4717	0,44
FASW	2016	6	0,6000	0	29,7808	0,28
ICBP	2016	9	0,5000	0	30,9949	0,17
INDF	2016	10	0,3750	0	32,0399	0,17
INKP	2016	10	0,4286	0	32,2297	0,22
INTP	2016	9	0,4286	1	31,0372	0,89
KRAS	2016	6	0,4000	1	31,6716	0,22
LSIP	2016	5	0,3333	1	29,8926	0,11
MLBI	2016	4	0,5714	1	28,4530	0,50
SGRO	2016	6	0,3333	0	29,7506	0,22
SMAR	2016	6	0,5000	1	30,8945	0,33
SMBC	2016	9	0,5000	1	30,6148	0,61
SMBR	2016	5	0,6000	1	29,1055	0,11
SMGR	2016	7	0,2857	1	31,4204	0,61
TKIM	2016	9	0,5000	1	31,2149	0,67
WTON	2016	7	0,2500	1	29,1707	0,33
AALI	2017	7	0,4000	1	30,8473	0,44
AMFG	2017	11	0,3333	0	29,4664	0,11
ANJT	2017	5	0,5000	1	29,7383	0,44
BUDI	2017	7	0,3333	0	28,7091	0,22
CTBN	2017	5	0,3333	0	28,4005	0,44
FASW	2017	6	0,6000	0	29,8685	0,28
ICBP	2017	9	0,5000	0	31,0848	0,22
INDF	2017	10	0,3750	0	32,1129	0,44
INKP	2017	10	0,4286	0	32,3339	0,22
INTP	2017	9	0,4286	1	30,9936	0,83
KRAS	2017	6	0,3333	1	31,7158	0,22
LSIP	2017	5	0,3333	1	29,9188	0,61
MLBI	2017	4	0,5000	1	28,5513	0,28
SGRO	2017	5	0,3333	1	29,7550	0,33
SMAR	2017	6	0,5000	1	30,9400	0,50

SMBC	2017	9	0,4286	1	30,6079	0,61
SMBR	2017	5	0,2000	1	29,2525	0,11
SMGR	2017	7	0,2857	1	31,5221	0,67
TKIM	2017	7	0,5000	1	31,2499	0,50
WTON	2017	7	0,4286	1	29,5866	0,28
AALI	2018	7	0,5000	1	30,9215	0,33
AMFG	2018	11	0,3333	0	29,7631	0,28
ANJT	2018	4	0,5000	1	29,7941	0,56
BUDI	2018	7	0,3333	0	28,8524	0,22
CTBN	2018	5	0,3333	0	28,4412	0,44
FASW	2018	7	0,3333	0	30,0257	0,17
ICBP	2018	6	0,5000	0	31,1681	0,33
INDF	2018	9	0,3750	0	32,2010	0,50
INKP	2018	10	0,4286	0	32,4705	0,22
INTP	2018	9	0,3333	1	30,9557	0,78
KRAS	2018	6	0,3333	1	31,7595	0,22
LSIP	2018	5	0,3333	1	29,9373	0,61
MLBI	2018	4	0,5000	1	28,6921	0,44
SGRO	2018	4	0,3333	1	29,8304	0,28
SMAR	2018	7	0,4286	1	31,0089	0,56
SMBC	2018	3	0,4286	1	30,5578	0,56
SMBR	2018	5	0,4000	1	29,3427	0,17
SMGR	2018	7	0,2857	1	31,5586	0,61
TKIM	2018	6	0,4286	1	31,3882	0,33
WTON	2018	7	0,4286	1	29,8150	0,33
AALI	2019	7	0,5000	1	30,9259	0,11
AMFG	2019	6	0,3333	0	29,7987	0,50
ANJT	2019	5	0,4286	1	29,8324	0,22
BUDI	2019	7	0,3333	0	31,0322	0,44
CTBN	2019	6	0,3333	0	25,8726	0,17
FASW	2019	5	0,3750	0	30,0061	0,22
ICBP	2019	10	0,5000	0	31,2871	0,22
INDF	2019	8	0,3750	0	32,1974	0,22
INKP	2019	7	0,4286	0	32,4416	0,33
INTP	2019	9	0,3333	1	30,9527	0,89
LSIP	2019	6	0,4000	1	29,9559	0,61
MLBI	2019	4	0,3333	1	28,6947	0,28
SGRO	2019	4	0,3333	0	29,8788	0,33
SMAR	2019	6	0,4286	1	30,9556	0,50
SMBC	2019	3	0,3333	1	30,6049	0,61
SMBR	2019	5	0,4000	1	29,3486	0,11

SMGR	2019	7	0,2857	1	32,0106	0,67
TKIM	2019	4	0,4286	0	31,4205	0,56
WTON	2019	6	0,5000	1	29,9668	0,33
KRAS	2019	6	0,3333	1	31,7595	0,22



Lampiran 3 : Hasil Output SPSS

1. Analisis Statistik deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Direksi	80	3	11	6,66	1,987
Dewan Komisaris	80	,2000	,6000	,404043	,0865947
Komite Lingkungan	80	0	1	,61	,490
Ukuran Perusahaan	80	25,8726	32,4705	30,366799	1,2292498
CED	80	,06	,89	,3799	,19676
Valid N (listwise)	80				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	80
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	
<i>Mean</i>	,0000000
<i>Std. Deviation</i>	,17779779
<i>Most Extreme Differences</i>	
<i>Absolute</i>	,083
<i>Positive</i>	,083
<i>Negative</i>	-,059
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	,741
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	,642

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

b. Hasil Uji Multikolinearitas

*Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1	(Constant)	-,551			,542	
	Dewan Direksi	,005	,013	,056	,437	,663	1,482
	Dewan Komisaris	-,149	,239	-,066	-,624	,534	1,013
	Komite Lingkungan	,158	,046	,393	3,426	,001	1,208
	Ukuran Perusahaan	,028	,019	,176	1,484	,142	1,298

a. Dependent Variable: CED

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,551	,542		-1,016	,313
	Dewan Direksi	,005	,013	,056	,437	,663
	Dewan Komisaris	-,149	,239	-,066	-,624	,534
	Komite Lingkungan	,158	,046	,393	3,426	,551
	Ukuran Perusahaan	,028	,019	,176	1,484	,142

d. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,428 ^a	,183	,140	,18248	2,657

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Komite Lingkungan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,348 ^a	,121	,110	,16874646	2,093

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,561	,140	4,212	,004 ^a
	Residual	2,497	,033		
	Total	3,058			

b. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,551	,542		-1,016	,313
	Dewan Direksi	,005	,013	,056	,437	,663
	Dewan Komisaris	-,149	,239	-,066	-,624	,534
	Komite Lingkungan	,158	,046	,393	3,426	,001
	Ukuran Perusahaan	,028	,019	,176	1,984	,042

a. Dependent Variable: CED

c. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,428 ^a	,183	,140	,18248

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Komite Lingkungan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi

b. Dependent Variable: CED

sumber : data diolah

